

PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, UTANG LUAR NEGERI DAN KEMISKINAN (KAJIAN TEORITIS DI INDONESIA)

Dwi Susilowati, Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto
Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang
E-mail: dwi_s@umm.ac.id, dan al.ayudie@gmail.com

Abstract

This study was conducted with the intention of examining the causal relationship between the following variables: Human Development Index (HDI), foreign debt, poverty, and economic growth. The data used in this investigation was secondary data from 1990 to 2013 which then analyzed by applying Granger causality tests performed six times that ultimately obtained the following results: (1) there was no causal relationship between Human Development Index (HDI) and Foreign Debt (AD); (2) there was a one-way causal relationship between foreign debt (AD) and poverty; (3) there was a one-way causal relationship between economic growth with Foreign Debt (AD); (4) there was no causal relationship between poverty with Human Development Index (HDI); (5) there was no causal relationship between Economic Growth and Human Development Index (HDI); and (6) there was a one-way causal relationship between economic growth and poverty.

Keywords: *Poverty, Foreign Debt, Economic Growth*

Abstrak

Penelitian ini akan menguji hubungan kausal antara variabel, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), utang luar negeri, Kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan Granger kausalitas kuis dengan menggunakan data sekunder 1990-2013. Hasil uji kausalitas menunjukkan tidak ada hubungan kausal antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Utang Luar Negeri (AD), uji kausalitas kedua menunjukkan bahwa hubungan kausal satu arah antara Utang Luar Negeri (AD) ke Kemiskinan. Uji kausalitas ketiga menunjukkan bahwa satu arah hubungan kausal antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Utang Luar Negeri (AD), uji kausalitas keempat menunjukkan bahwa, tidak ada hubungan kausal antara Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Uji kausalitas kelima tidak menunjukkan hubungan sebab akibat terjadi antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Uji kausalitas keenam yang menunjukkan satu arah hubungan kausal dengan Pertumbuhan Ekonomi Kemiskinan.

Kata kunci: *Kemiskinan, Utang Luar Negeri, Pertumbuhan Ekonomi*

Indonesia merupakan salah satu negara sedang berkembang yang ditandai dengan sebagian besar masyarakatnya miskin, ada pula

beberapa daerah yang makmur dengan segelintir penduduk yang hidup dalam kemewahan. Sistem perbankan jelek, pinjaman dalam

kecil terpaksa diperoleh dari pemilik uang yang tidak lebih baik daripada seorang lintah darat, tingkat pengangguran yang tinggi dan terjerat dalam lingkaran utang luar negeri. Permasalahan tersebut tidak cukup diatasi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan jaminan dapat menyejahterakan masyarakatnya.

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia nampak selalu memberikan prediksi optimistik yang meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) secara kumulatif PDB tumbuh 5,9% per tahun 2010, lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian tahun 2009 pada periode yang sama, yaitu hanya sebesar 5,8% saja. Cadangan devisa mencapai 94,7 milyar dollar AS dan nilai ekspor mencapai 150 milyar dollar AS. Angka pertumbuhan tersebut sepiantas menunjukkan bahwa kinerja ekonomi Indonesia semakin baik. Pihak asing semacam *World Economic Forum* (WEP) menggambarkan Perekonomian Indonesia mulai digerakkan oleh *Efficiency Driven Economy* dari semula *Factor Driven Economy*. Bahkan *The Economist* menyebutnya sebagai calon kekuatan ekonomi baru dunia (*world leading economies*).

Namun, apabila dicermati ada indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut adalah petumbuhan yang semu (*bubble economics*). Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia meski pertumbuhan PDB dikatakan bagus. Kemiskinan sudah sejak lama menjadi masalah bangsa Indonesia, dan hingga sekarang masih belum menunjukkan tanda-tanda berkurang secara signifikan. Angka statistik terus saja memberikan informasi masih banyaknya jumlah penduduk miskin, berdasarkan data BPS Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 sebesar 31,02 juta orang (13,33 %).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun seringkali tidak disadari kehadirannya sebagai masalah untuk oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana mereka hidup dalam kemiskinan. Walaupun demikian belum tentu mereka itu sadar akan kemiskinan yang mereka jalani. Kesadaran akan kemiskinan yang mereka miliki itu, baru terasa pada waktu mereka membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan sosial yang lebih tinggi.

Secara sederhana Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar hidup yang minimum, yaitu suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang minimum ini secara langsung akan berpengaruh terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Kemiskinan itu sendiri dapat dilihat dari kondisi tingginya pengangguran, banyaknya pengemis di jalanan maupun yang berkeliaran di kampung-kampung sebagai salah satu indikatornya. Begitu pula PSK dan anak jalanan yang terkena razia, bisa dipastikan 90 % beralasan karena faktor ekonomi. Belum lagi anak putus sekolah yang selalu meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Lansia terlantar, anak terlantar, penyan-

dang cacat terlantar, semakin melengkapi data penyandang masalah sosial yang berpangkal pada kemiskinan. Seperti halnya anak-anak yang masih di bawah umur sudah menjadi pengemis.

Kemiskinan tidak dapat dihilangkan sama sekali, tetapi dapat dikurangi melalui program pembangunan yang berkelanjutan, oleh karena itu pe ngurangan penduduk miskin telah menjadi tujuan pembangunan yang fundamental sehingga menjadi sebuah alat ukur untuk menilai efektivitas berbagai jenis program pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi instrumen yang sangat berpengaruh dalam penurunan kemiskinan pendapatan (*income poverty*).

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah penurunan laju jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Pantjar Simatupang dan Saktyanu K, 2003).

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia dalam menyikapi jumlah kemiskinan perlu melakukan empat langkah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Keempat langkah tersebut adalah peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemusatan kebijakan sosial ekonomi, dan penyesuaian kebijakan pengurangan kemiskinan sesuai dengan kondisi daerah (<http://www.gatra.com>, 17 Oktober 2003).

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*), peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat diperlihatkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Peningkatan pengetahuan dan keahlian akan mampu mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang sehingga akan mampu membantu dalam mengurangi angka kemiskinan.

Selain itu kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang juga rendah. Tingkat investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik perkapita yang rendah juga dan hal tersebut terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan demikian seterusnya, sehingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan sebagai sebuah hubungan sebab dan akibat (teori Nurkse, 1952) dan telah dibuktikan untuk contoh kasus lingkaran kemiskinan di Indonesia (Sumanta, Jurnal Kebijakan Ekonomi; 2005).

Indikator keberhasilan pembangunan dapat diukur salah satunya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi ang-

ka Indeks Pembangunan Manusia berarti semakin baik, sehingga dapat dikatakan pembangunan semakin berhasil. Indeks Pembangunan Manusia diukur dengan menggunakan indikator angka harapan hidup, tingkat melek huruf, rata-rata lama sekolah dan konsumsi perkapita.

Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis keuangan yang berlanjut menjadi krisis ekonomi, sehingga utang luar negeri Indonesia menjadi sangat besar, kurang lebih separuh dari anggaran habis untuk pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia banyak didominasi oleh utang swasta. Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia melakukan pelunasan utang kepada IMF. Pelunasan sebesar 3,181,742,918 dolar AS merupakan sisa pinjaman yang seharusnya jatuh tempo pada akhir 2010.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan diteliti atau dianalisis adalah hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, kemudian pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan manusia. Data yang digunakan peneliti dalam analisis ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS, BI, dan lain sebagainya. Variabel-variabel yang diteliti adalah variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin dan Indkes Pembangunan Manusia (IPM). Dalam penelitian ini tidak ada variabel terikat, karena kedua variable merupakan variabel independen yang saling mempengaruhi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji kausalitas Granger (1969). Yaitu metode analisis dengan mengestimasi arah hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel yang diestimasi.

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X + \alpha_2 X_{(-1)} + \alpha_3 X_{(-2)} + \beta_1 Y_{(-1)} + \beta_2 Y_{(-2)} + U_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 Y_{(-1)} + \beta_2 Y_{(-2)} + U_2 \dots \dots \dots (2)$$

Null hypothesis (H₀): $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$

Y menyebabkan X jika H₀: $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$ dapat ditolak.

$$X = \alpha_0 + \alpha_1 Y + \alpha_2 Y_{(-1)} + \alpha_3 Y_{(-2)} + \beta_1 X_{(-1)} + \beta_2 X_{(-2)} + U_1 \dots \dots \dots (3)$$

$$X = \alpha_0 + \beta_1 X_{(-1)} + \beta_2 X_{(-2)} + U_2 \dots \dots \dots (4)$$

Null hypothesis (H₀): $\beta_1 = \beta_2 = 0$

X menyebabkan Y jika H₀: $\beta_1 = \beta_2 = 0$ dapat ditolak.

Keputusan apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan atau sebaliknya kemiskinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi digunakan uji F. Nilai F hitung diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$F = (n - k) \frac{(RSS_R - RSS_{UR})}{m(RSS_{UR})}$$

Di mana:

RSS_R dan RSS_{UR} = berturut-turut adalah nilai Residual Sum of Squares di dalam persamaan restricted dan unrestricted

n = jumlah observasi

m = jumlah lag

k = jumlah parameter yang diestimasi di dalam persamaan unrestricted

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji kausalitas Granger (1969) yang dipadukan dengan metode penentuan kelambanan waktu (lag) final prediction error (FPE) dari Hsiao (1979). Digunakannya metode penentuan lag FPE dalam penelitian ini adalah berangkat dari salah satu kelemahan utama dari uji kausalitas Granger (1969), yaitu berkaitan dengan penentuan lag. Uji kausalitas Granger tersebut, dalam khasanah analisis ekonometrika memang harus diakui bahwa sa-

ngat besar kontribusinya dalam menguji hubungan kausalitas antara variabel-variabel ekonomi yang terkait. Akan tetapi perlu diketahui bahwa uji kausalitas tersebut dalam menetapkan lag dilakukan tanpa pedoman yang pasti, apakah satu lag; dua lag; ataukah tiga lag dan seterusnya, padahal dalam kasus tertentu, katakanlah dalam kasus hubungan kausalitas antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, kelambaman waktu antara dua variabel tersebut ini terjadi (kelambaman waktu antara variabel yang sedang diamati berbeda), maka hasil penelitian tersebut akan terjerumus dalam regresi lancung yang dapat menimbulkan tidak validnya atau tidak dapat dipercayainya hasil penelitian seperti (Aliman, 1998: 12-29). Oleh karena itu, uji kausalitas Granger (1969) sebaiknya dipadukan dengan metode perhitungan lag seperti FPE.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertumbuhan ekonomi selama ini dianggap sebagai jargon dalam keberhasilan pembangunan ekonomi di Negara sedang berkembang termasuk juga di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mutlak diperlukan untuk mendokrak laju pembangunan ekonomi. Sangat diyakini, bahwa hanya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka permasalahan pembangunan seperti, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pembangunan dapat diatasi melalui dampak merembes ke bawah (*trickle down effect*). Oleh karena itu indikator keberhasilan pembangunan hanya dilihat dari meningkatnya pendapatan perkapita. (Mudrajad Kuncoro, 2006).

Dalam perkembangannya indikator pembangunan yang berdasarkan pada kenaikan pendapatan perkapita melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mulai mengalami per-

geseran. Artinya bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tetapi banyak faktor lain yang ikut mempengaruhinya. Hal ini didukung dengan keberhasilan beberapa Negara sedang berkembang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi di sisi lain kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan juga tinggi. Sehingga makna pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak relevan lagi.

Paradigma pembangunan yang baru (lahir pada akhir dasawarsa 1960 an), mengkritisi bahwa pertumbuhan tidak identik dengan pembangunan, seperti yang dikatakan oleh Meier (dalam Mudrajad K, 2006), “.....perhaps the definition that would now gain widest approval is one that defines economic development as the process whereby the real percapita income of a country increases over a long period of time ___subject to the stipulation that the number of people below an “absolute poverty line” does not increase, and that the distribution of income does not more unequal”. Pembangunan menurutnya tidak lagi memuja Gross National Product (GNP) sebagai tujuan pembangunan tetapi yang lebih penting lagi adalah kualitas dari proses pembangunan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu tetapi harus diikuti dengan kualitas dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Paradigma yang baru mengisyaratkan bahwa indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya mencakup masalah ekonomi tetapi juga masalah yang lain, seperti sosial dan politik. Dengan demikian indikator kunci dalam keberhasilan pembangunan tidak lagi ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga diikuti indikator sosial seperti *Human Development Index* (HDI) dan *Physical Quality Life Index* (PQLI).

Laju pertumbuhan Produk domestik Bruto (PDB) sudah lazim digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, demikian pula di Indonesia. Dari tabel 1 terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2010 sebesar 6,1 persen, tahun 2011 sebesar 6,5 persen, tahun 2012 sebesar 6,29 persen dan pada tahun 2013 sebesar 5,83 persen. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk kurun waktu 2010-2013 mengalami penurunan. Penurunan ini masih dianggap wajar karena masih di atas rata-rata Negara lain. Penurunan ini terjadi karena kondisi perekonomian yang tidak stabil dan penuh dengan ketidakpastian.

Menurut Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2012-2016 rata-rata mencapai 6,6 persen, ini berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tinggi di antara Negara ASEAN lainnya, namun prediksi OECD tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan dengan target Pemerintah Indonesia, yaitu pada tahun 2012 sebesar 6,7 persen.

Ketidakpastian global akhir-akhir ini menghantui pertumbuhan ekonomi Asia. Ketidakpastian tersebut berasal pada penurun-

an kepercayaan akan kebijakan fiskal Amerika Serikat dan berlanjutnya krisis utang di kawasan Eropa. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, negara-negara berkembang di Asia tidak bisa menghindar dari imbas perlambatan ekonomi global. Situasi perekonomian global yang masih dibayang-bayangi berbagai ketidakpastian, seperti prospek pemulihan ekonomi di Eropa (terutama negara yang mengalami krisis hutang, seperti: Yunani, Italia, Portugal dan Spanyol) dan ancaman jurang fiskal (*fiscal cliff*) di AS akibat perbedaan kepentingan antara Pemerintahan dengan Kongres terkait strategi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, efisiensi pengeluaran negara untuk perlindungan sosial dan kesehatan (*Obamacare*), serta batasan hutang dan defisit anggaran pemerintah AS, yang sempat mengakibatkan penutupan sementara aktivitas pemerintahan federal (*government shut down*). (www.sekneg.go.id)

Berdasarkan data dari OECD, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012-2016 merupakan pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan kelima negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia yang hanya diprediksi tumbuh 5,3%, Filipina sebesar 4,9%, Singapura sebesar 4,6%, Thailand sebesar

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia menurut Pengeluaran (dalam %) Tahun 2010- 2013

| Jenis Pengeluaran | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* |
|---------------------------------|------|------|------|-------|
| Konsumsi Rumah Tangga | 4,6 | 4,7 | 5,28 | 5,29 |
| Konsumsi Pemerintah | 0,3 | 3,2 | 1,25 | 4,05 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 8,5 | 8,8 | 9,81 | 4,81 |
| Ekspor Barang dan Jasa | 14,9 | 13,6 | 2,01 | 4,56 |
| Dikurangi Impor Barang dan Jasa | 17,3 | 13,3 | 6,65 | 1,38 |
| Pertumbuhan PDB | 6,1 | 6,5 | 6,29 | 5,83 |

Sumber: Litbang Kompas, 7 Nopember 2013

Ket: *Pertumbuhan kumulatif dari triwulan I sampai dengan III tahun 2013

4,5%, dan Vietnam 6,3%. Sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi di negara tersebut sebesar 5,6 persen. Rata-rata pertumbuhan negara Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam akan mencapai 5 persen pada tahun 2011, dan ditargetkan menjadi 5,6 persen selama tahun 2012-2016. (detik finance, 2011).

Kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi yaitu bekisar 6% dan bahkan pada tahun 2013 pemerintah memprediksikan tetap berada pada kisaran 6% meskipun kondisi krisis global tetap terjadi, namun angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1990 – 2012 dapat dilihat pada gambar 1.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin menunjukkan angka yang cenderung menurun, Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 turun menjadi 31,02 juta orang (13,33 persen) jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15 persen).

Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun lebih besar daripada daerah pedesaan. Selama periode Maret 2009-Maret

2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta orang, sementara di daerah pedesaan berkurang 0,69 juta orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan tidak banyak berubah dari Maret 2009 ke Maret 2010. Pada Maret 2009, sebagian besar (63,38 persen) penduduk miskin berada di daerah pedesaan begitu juga pada Maret 2010, yaitu sebesar 64,23 persen.

Kondisi ini, apabila dicermati ada indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pertumbuhan yang semu (*bubble economics*). Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia meski pertumbuhan PDB dikatakan bagus. Untuk menekan angka kemiskinan, seringkali pemerintah mengambil langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengharapkan terjadinya efek menetes ke bawah (*trickle down effect*), selain itu untuk mengatasi kemiskinan juga perlu ditingkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).

Kemiskinan juga seringkali berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator yang mengukur dari aspek yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan dan kualitas hidup setiap penduduk sebagai upaya melengkapi indikator



Sumber: World Bank dan BPS (diolah)

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1990 - 2012

pengukuran keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Indeks ini dapat menggambarkan kondisi kualitas hidup penduduk dari aspek non ekonomi maupun aspek ekonomi. Cara pengukurannya pun berdasarkan penghitungan variabel individu penduduk, bukan variabel akumulatif atau kolektif, misal pertumbuhan ekonomi diukur dari perubahan output total penduduk tanpa melihat siapa penghasilnya.

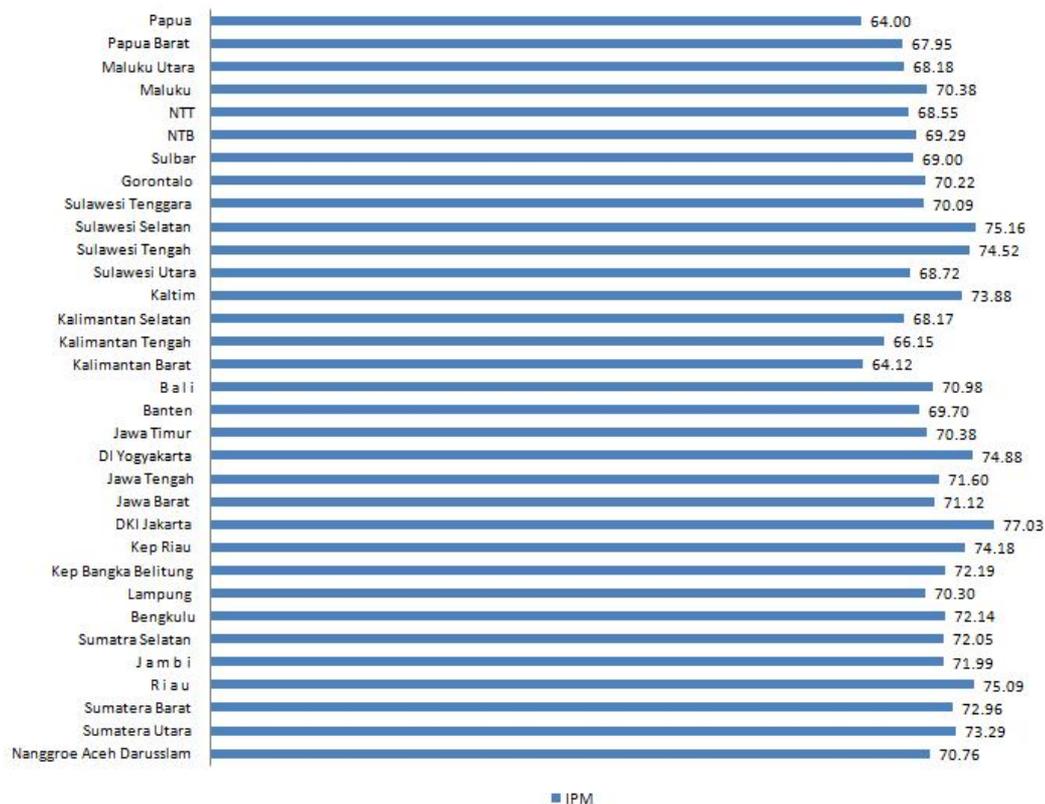
Upaya peningkatan sumberdaya manusia, indeks pembangunan manusia merupakan salah satu variabel yang penting. Di mana pembangunan manusia seutuhnya akan berpengaruh terhadap kualitas hidup dan lingkungan sosialnya. Gambar 2 adalah kondisi IPM masing-masing provinsi di Indonesia.

Berdasarkan gambar 2, IPM yang paling rendah berada di Provinsi Papua yaitu

sebesar 64,00 dan paling tinggi yaitu di DKI Jakarta yaitu sebesar 77,03.

Adapun terkait dengan utang luar negeri, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan dan Direktorat Internasional Bank Indonesia, bahwa dari 2005 sampai dengan 2010, posisi utang luar negeri Indonesia secara nominal meningkat sebesar USD65,5 miliar (48,7%). Peningkatan terjadi baik pada utang luar negeri pemerintah maupun swasta. Namun demikian, pada periode yang sama peningkatan utang luar negeri tersebut diikuti peningkatan PDB yang relatif lebih besar yaitu sebesar USD424,0 miliar (146,5%).

Secara umum beberapa indikator beban utang luar negeri Indonesia telah memperlihatkan perbaikan signifikan. Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB terus



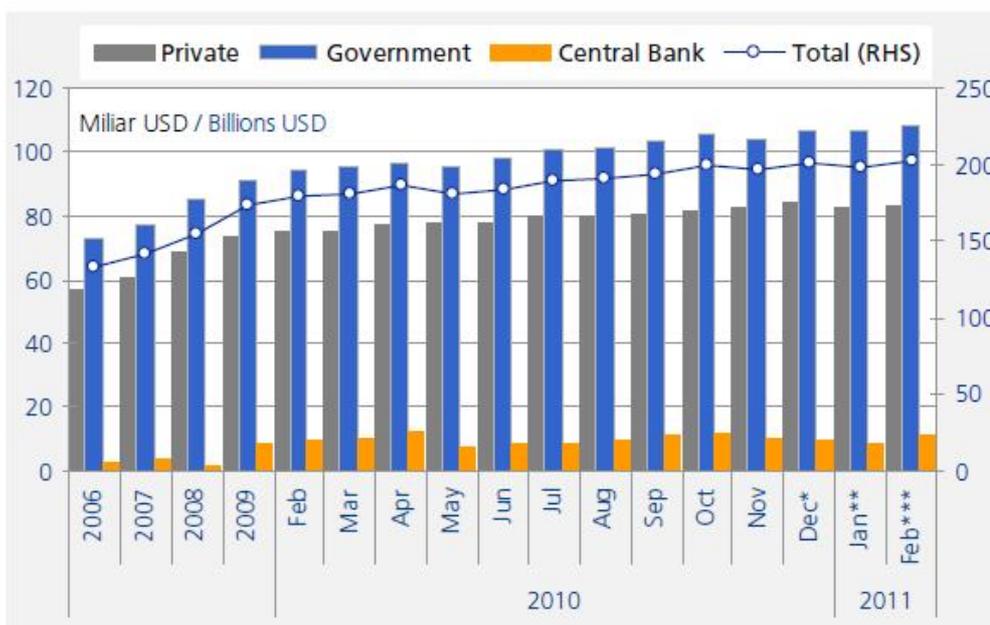
Gambar 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Masing-masing Provinsi di Indonesia

menurun. Pada 1998 tercatat sebesar 150%, kemudian menurun menjadi 54,9% pada 2004 dan menjadi 28,0% pada 2010. Rasio utang terhadap ekspor juga mengalami penurunan secara signifikan dari 179,7% pada 2004 menjadi 108,5% pada 2010. Pada periode yang sama, *debt service ratio* (DSR) Indonesia terlihat berfluktuasi. Pada 2006 *debt service ratio* mencatat angka tertinggi 25,0%, kemudian terus menurun menjadi 21,5% pada 2010.

Sementara itu, per 31 Desember 2010, rasio total utang pemerintah (dalam dan luar negeri) terhadap PDB menurun tajam menjadi 26%, dari sebesar 47% pada 2005, dan sebesar 89% pada 2000. Pada 2001 rasio utang terhadap PDB masih sebesar 77,0 persen turun menjadi 34,7 persen pada 2008. Nilai rasio utang pemerintah terhadap PDB yang moderat merupakan cerminan dari kebijakan fiskal yang efisien dan berhati-hati.

Memang rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), yang mengindikasi-

kan peningkatan kemampuan Indonesia dalam membayar utang, cenderung menurun pada setiap tahunnya. Akan tetapi, menurut Sukarna dan Mamun (2005) dampak dari utang luar negeri akan membebani APBN. Konsekuensi dari utang luar negeri yang banyak yaitu *pertama*, APBN semakin sulit diharapkan menjadi stimulus APBN karena porsi yang dihabiskan untuk membayar utang sangat besar. *Kedua*, terjadi penarikan dana secara besar-besaran dari masyarakat yang berupa kenaikan pajak dan berbagai pungutan lain yang dibarengi dengan pengurangan subsidi. *Ketiga*, dana masyarakat yang ditarik itu dialokasikan untuk kreditor luar negeri (dalam bentuk cicilan pokok dan bunga utang) dan kepada bankir dalam negeri (dalam bentuk pembayaran pokok dan bunga obligasi rekap serta surat utang pemerintah). Di satu sisi, aliran dana ke luar negeri akan berdampak pada hilangnya sumber dana dan daya kegiatan ekonomi domestik, namun di sisi lain, pembayaran utang dalam negeri tidak



Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI
 Gambar 3. Posisi ULN Pemerintah, Bank Sentral dan Swasta

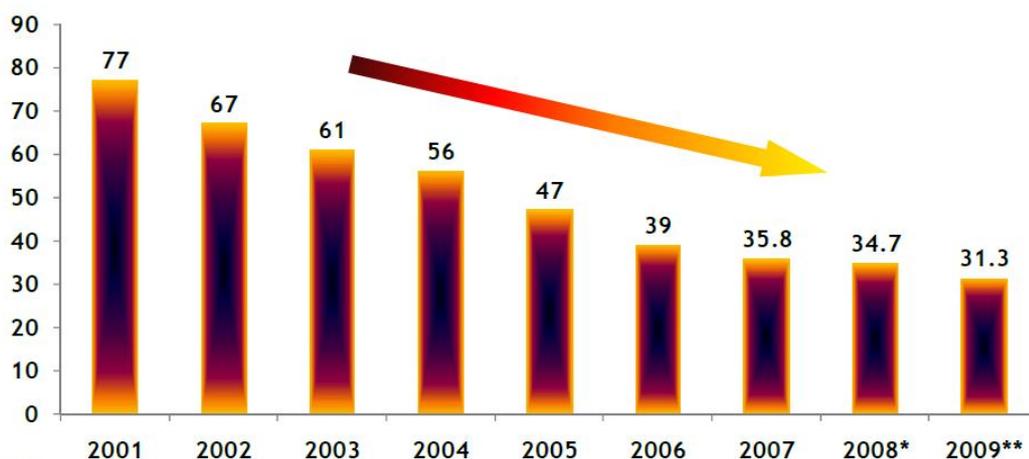
menghasilkan *multiplier effect* dan keterkaitan antar sektor (*linkage*) yang tinggi akibat rendahnya *loan to deposit ratio*. *Keempat*, penarikan dana akan mengurangi *disposable income* masyarakat sehingga dana domestik tertekan. Akibatnya, pertumbuhan konsumsi dalam negeri sebagai faktor kunci dalam pertumbuhan kurang berperan.

Untuk melihat pola hubungan yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi dengan Pembangunan Manusia, Utang Luar Negeri dan Kemiskinan di Indoensia digunakan uji kausalitas Granger. Adapun hasil uji kausalitas Granger dapat di lihat dalam tabel 2.

Uji kausalitas yang pertama yaitu antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Hutang Luar Negeri (HLN), dan hubungan antara Hutang Luar negeri (HLN) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan hasil uji kausalitas pada lag 3 diperoleh nilai F-stat sebesar 0,10 untuk hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Hutang Luar Negeri (HLN) dan F-stat sebesar 0,91 untuk Hubungan Hu-

tang Luar negeri (HLN) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada $\alpha = 5\%$ dan $df = 21$ diperoleh F-tab sebesar 2,53. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kedua-duanya dengan nilai F-stat sebesar 0,10 dan 0,91 $<$ F-tab 2,53, hal ini berarti menerima H_0 dan menolak H_a . Dengan Demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Hutang Luar Negeri (HLN), demikian juga tidak ada hubungan kausalitas antara untuk Hutang Luar Negeri (HLN) dengan Indkes Pembangunan Manusia (IPM).

Uji kausalitas yang kedua yaitu antara Kemiskinan dan Hutang Luar Negeri. Berdasarkan hasil uji kausalitas pada lag 3 diperoleh nilai F-stat sebesar 0,52 untuk Kemiskinan terhadap Hutang Luar negeri (HLN) dan nilai F-stat sebesar 1,54 untuk Hutang Luar Negeri (HLN) terhadap Kemiskinan, pada $\alpha = 25\%$ dan $df = 21$ diperoleh F-tab sebesar 1,41. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai F-stat 1,54 $>$ F-tab 1,41 berarti dengan demikian untuk variabel Hutang Luar



Catatan:

* Menggunakan angka stok utang sementara s.d. 31 Desember 2008 sebesar Rp.1,622.57 triliun, dan realisasi PDB dari DJA s.d. 31 Desember 2008 sebesar Rp.4,681.88 triliun

** Angka sangat sementara s.d. 31 Januari 2009

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI

Gambar 4. Rasio Utang terhadap PDB (%)

Negeri (HLN) terhadap Kemiskinan menolak H_0 dan menerima H_a pada tingkat signifikan 25%. Sedangkan untuk variabel Kemiskinan terhadap Hutang luar Negeri (HLN) nilai F-stat $0,52 < F\text{-tab } 1,41$ berarti menerima H_0 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan satu arah yaitu antara Hutang Luar negeri (HLN) terhadap Kemiskinan.

Uji kausalitas yang ketiga yaitu antara Pertumbuhan Ekonomi dan Hutang Luar Negeri (HLN). Berdasarkan hasil uji kausalitas pada lag 3 diperoleh nilai F-stat sebe-

sar $3,07$ untuk Pertumbuhan Ekonomi terhadap Hutang Luar Negeri dan F-stat sebesar $0,57$ untuk Hutang Luar Negeri (HLN) terhadap Pertumbuhan Ekonomi, pada $\alpha = 5\%$ dan $df = 21$ diperoleh F-tab sebesar $2,53$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa F-stat $3,07 > F\text{-tab } 2,53$ berarti untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Hutang luar Negeri (HLN) menolak H_0 dan menerima H_a pada tingkat signifikan 5%. Sedangkan untuk variabel Hutang Luar negeri (HLN) terhadap Pertumbuhan Ekonomi nilai F-stat sebesar $0,57 < F\text{-tab } 2,53$ berarti menerima H_0 .

Tabel 2. Rangkuman Hasil Uji Kausalitas Granger

| Pairwise Granger Causality Tests | | | | | |
|---|-----|-------------|--------|-------------|-------------------------|
| Date: 04/17/14 Time: 05:54 | | | | | |
| Sample: 1990 2013 | | | | | |
| Lags: 3 | | | | | |
| Null Hypothesis: | Obs | F-Statistic | Prob. | Hasil | Keterangan |
| LIPM does not Granger Cause LHLN | 21 | 0.10991 | 0.9529 | Ho Diterima | Tidak ada |
| LHLN does not Granger Cause LIPM | | 0.90717 | 0.4624 | Ho Diterima | Kausalitas |
| LKEMISKINAN does not Granger Cause LHLN | 21 | 0.52460 | 0.6724 | Ho Diterima | Hubungan 1 |
| LHLN does not Granger Cause LKEMISKINAN | | 1.54816*** | 0.2461 | Ho Ditolak | Arah (HLN – Kemiskinan) |
| LPE does not Granger Cause LHLN | 21 | 3.06753* | 0.0627 | Ho Ditolak | Hubungan 1 |
| LHLN does not Granger Cause LPE | | 0.57362 | 0.6417 | Ho Diterima | Arah (PE – HLN) |
| LKEMISKINAN does not Granger Cause LIPM | 21 | 0.22316 | 0.8787 | Ho Diterima | Tidak ada |
| LIPM does not Granger Cause LKEMISKINAN | | 0.06395 | 0.9780 | Ho Diterima | Kausalitas |
| LPE does not Granger Cause LIPM | 21 | 0.15512 | 0.9246 | Ho Diterima | Tidak ada |
| LIPM does not Granger Cause LPE | | 0.03503 | 0.9908 | Ho Diterima | Kausalitas |
| LPE does not Granger Cause LKEMISKINAN | 21 | 1.16392 | 0.3584 | Ho Diterima | Hubungan 1 |
| LKEMISKINAN does not Granger Cause LPE | | 3.11086* | 0.0605 | Ho Ditolak | Arah (Kemiskinan - PE) |

Sumber: data diolah

Keterangan: *) Signifikan pada α 5% (2,53)

**) Signifikan pada α 10% (2,05)

***) Signifikan pada α 25% (1,41)

Dengan demikian terjadi hubungan satu arah yaitu Pertumbuhan Ekonomi terhadap Hutang Luar Negeri (HLN).

Uji kausalitas yang keempat yaitu antara Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan hasil uji kausalitas pada lag 3 diperoleh nilai F-stat sebesar 0,22 untuk Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan nilai F-stat sebesar 0,06 untuk hubungan indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan, pada $\alpha = 5\%$ dan $df = 21$ diperoleh nilai F-tab sebesar 2,53. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan nilai F-stat sebesar 0,22 dan $0,06 < F\text{-tab } 2,53$ berarti menerima H_0 dan menolak H_a . Sehingga dapat disimpulkan, bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara variabel Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Kemiskinan. Dengan demikian tidak terjadi hubungan kausalitas antara Kemiskinan dengan IPM.

Uji kausalitas yang kelima yaitu antara Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan hasil uji kausalitas pada lag 3 diperoleh hasil nilai F-stat sebesar 0,15 untuk variable Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan nilai F-stat sebesar 0,04 untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi, pada $\alpha = 5\%$ dan $df = 21$ diperoleh F-tab sebesar 2,53. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan nilai F-stat sebesar 0,15 dan $0,04 < F\text{-tab } 2,53$, maka menerima H_0 dan menolak H_a . Dengan demikian untuk tidak ada hubungan kausalita antara variabel Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian tidak ter-

jadi hubungan kausalitas antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Uji kausalitas yang keenam yaitu antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Berdasarkan hasil uji kausalitas pada lag 3 diperoleh nilai F-stat sebesar 1,16 untuk Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan dan F-stat sebesar 3,11 untuk Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, pada $\alpha = 5\%$ dan $df = 21$ diperoleh F-tab sebesar 2,53. Hal ini dapat disimpulkan bahwa F-stat $3,11 > F\text{-tab } 2,53$ berarti untuk variabel Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi menolak H_0 dan menerima H_a pada tingkat signifikan 5%. Sedangkan untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan nilai F-stat $1,16 < F\text{-tab } 2,53$ berarti menerima H_0 . Dengan demikian terjadi hubungan kausalitas satu arah yaitu Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kasus di Indonesia, Kemiskinan akan mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dikarenakan terbukti memiliki hubungan yang kuat. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi masih belum mampu secara signifikan mempengaruhi kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini sesuai temuan dari World Bank (2006) bahwa pertumbuhan ekonomi belum dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan dikarenakan pola dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu terjadinya ketimpangan. Sejak tahun 1998, pertumbuhan bukan saja berjalan dengan tingkat yang lebih rendah, tetapi juga menjadi semakin kurang merata. Sehingga Jumlah penduduk miskin tidak akan dapat dikurangi secara signifikan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi orang miskin. Menurut World Bank (2006) pada periode setelah krisis, berkurangnya

penduduk miskin lebih banyak disebabkan karena membaiknya stabilitas ekonomi dan turunnya harga bahan makanan.

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang terputus antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan dan IPM. Seringkali dijumpai di masyarakat yang sering melontarkan keluhan dan barangkali terdengar tidak enak bagi pemerintah, “katanya kinerja ekonomi sangat menggembirakan, tetapi kenapa hidup rakyat masih saja susah?”, “sebenarnya siapa yang menikmati buah kemakmuran yang selama ini terkumpul?” walaupun beberapa tahun terakhir perekonomian Indonesia terus menerus menunjukkan kinerja cukup bagus di saat terjadi krisis global, tetapi berbagai persoalan sosial utamanya kemiskinan dan pengangguran tidak memperlihatkan perubahan yang signifikan. Tampaknya ada masalah dengan soal distribusi kesejahteraan, sehingga menghadirkan “kaitan yang hilang” antara kinerja ekonomi dan kesejahteraan sosial. Prasetyantoko (dalam Prasetyantoko, et. al (ed), 2012) menyatakan:

“Saat ini terjadi ‘hilangnya titik temu’ antara kinerja ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sebagaimana diketahui, ada semacam paradoks dalam kinerja perekonomian Indonesia, kinerja ekonomi yang tinggi tidak disertai dengan meningkatnya kualitas hidup manusia secara memadai. Dengan demikian, prospek perekonomian Indonesia harus memasukkan sebuah agenda penting, yakni upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Fakta tentang hilangnya koneksitas antara kinerja ekonomi dan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi perhatian ahli ekonomi dan politik saja, tetapi juga para pengambil kebijakan dan penggiat sosial”.

Lebih lanjut Prasetyantoko menjelaskan bahwa persoalan tersebut bisa bersifat ideologis mengingat banyak cara berpikir ekonomi yang tidak memberi ruang lebih lapang bagi isu kesejahteraan sosial. Corak utama berpikir semacam itu adalah pertumbuhan ekonomi. Hal yang lebih diutamakan adalah bagaimana memperbesar “kue pembangunan” dan sama sekali tidak terkait dengan bagaimana kue ini harus dibagi. Pada dasarnya, cara pandang neoliberal yang mengandalkan kekuatan pasar dalam mendistribusikan kekayaan sangat tipikal mendorong pertumbuhan dan kinerja ekonomi yang tinggi, tanpa memedulikan bagaimana hasil kinerja itu dibagi dan dikelola.

Hal ini senada dengan Dillon (dalam Prasetyantoko, et. al (ed), 2012) yang menyebutkan bahwa sejak pembangunan dimulai pada masa Orde Baru sampai sekarang, belum terjadi transformasi ekonomi yang sebenarnya. Indikator dari hal ini terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari, meskipun pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, namun kehidupan mayoritas rakyat tetap tidak berubah jauh. Seringkali media menginfokan tentang orang-orang Indonesia superkaya dengan jumlah harta meningkat secara fantastis, namun di sisi lain kita juga menyaksikan realitas pahit kemiskinan terus terjadi pemandangan sehari-hari di depan mata.

Pertumbuhan, inflasi, kenaikan harga saham, cadangan devisa, dan lain-lain adalah deretan angka menghibur yang menghibasi media masa, tetapi secara kasat mata kemiskinan masih terus saja melekat dalam kehidupan anak bangsa seperti para petani gurem, buruh tani, pedagang kaki lima, pengangguran dan kaum terpinggirkan lainnya seperti pemulung.

Temuan berikutnya yaitu, hutang luar negeri tidak mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi, tetapi sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang akan mempengaruhi hutang luar negeri. Hal ini senada dengan beberapa temuan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa hutang luar negeri masih belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Meler dalam Sukarna dan Mamun (2005) menyebutkan bahwa dampak utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi polemik. Pasalnya, melalui berbagai model, jarang ditemukan dampak positif utang terhadap pertumbuhan ekonomi, bahkan model tertentu, utang justru berdampak negatif.

Penelitian Safitri (2008) juga diperoleh hasil bahwa bantuan luar negeri berpengaruh negatif terhadap produk domestik bruto (PDB). Sukarna dan Mamun (2005) juga menyebutkan bahwa hasil dari berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa hubungan antara utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi umumnya berkorelasi negatif, meskipun terdapat sejumlah kajian yang menolaknya. Namun, karena utang luar negeri masih merupakan bagian dari investasi sehingga berdampak positif juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, tujuan dasar utang luar negeri bukan pada substansinya, tetapi pada persoalan alokasi dan pemanfaatannya apakah secara proposional atau tidak.

Meskipun demikian, kebijakan pembangunan melalui utang luar negeri masih banyak dianut oleh negeri sedang berkembang. Sebabnya, pinjaman luar negeri diandalkan untuk membiayai pembangunan, memobilisasi sumberdaya, meningkatkan produksi dan ekspor, memperbaiki neraca pembayaran, dan manfaat ekonomi lainnya.

Tetapi utang luar negeri bukan hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi sa-

ja, melainkan juga politik, sosial, budaya, geografis, kemanusiaan dan pertimbangan lainnya. Oleh sebab itu, utang luar negeri masih seringkali jadi perdebatan, baik oleh ahli ekonomi, sosial, politik maupun ahli-ahli lainnya. Banyak ahli ekonomi yang mendukung keberadaan utang luar negeri karena berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tidak sedikit pula yang menentangnya. Demikian pula dengan ahli-ahli lainnya di mana pada umumnya berbagai pendapat tersebut dibedakan menjadi dua yaitu, paham kanan dan paham kiri.

Sukarna dan Mamun (2005) menyampaikan paham kanan atau kapitalis (Bauer, Gillis, Griffen, dan lainnya) mengkritik utang luar negeri sebagai cara yang tidak mendorong pembangunan. Mereka berpendapat bahwa utang luar negeri sering bermotifkan politik dari pada ekonomi yang menyebabkan terjadinya konflik ekonomi, sosial dan politik antara negara kreditur dan debitur. Selain itu, para penguasanya sering berebut kepentingan dalam memanfaatkan utang sehingga menciptakan konfrontasi antar mereka. Utang luar negeri di negara seperti India, Vietnam dan Ethiopia pernah disalahgunakan untuk pembelian senjata. Tetapi paham kanan pun mengakui bahwa utang luar negeri cukup berhasil dalam mendorong perekonomian suatu negara jika negara tersebut menggunakannya untuk kepentingan publik dengan dukungan masyarakatnya. *Rencana Marshall* yaitu bantuan Amerika terhadap Eropa yang kalah dalam Perang Dunia II berhasil karena sikap, mental dan ketrampilan orang Eropa yang sudah siap dalam menggunakan utang. Tidak demikian halnya dengan sikap dan mental penguasa dan masyarakat negara sedang berkembang.

Pada tahun 1950-60an, Harrod Domar menyatakan bahwa utang luar negeri

berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat. Sebab, alirannya dapat meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik sehingga utang luar negeri menghasilkan *multiplier effect* positif terhadap perekonomian.

Paham kanan juga berpendapat bahwa tujuan untuk meningkatkan demokrasi di negara debitur sering melenceng karena utang luar negeri secara implisit mengandung ideologi komunis yaitu sentralisasi dan kontrol ketat terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi harus melalui mekanisme pasar sehingga negara debitur harus melaksanakan pasar bebas dan memenuhi kriteria sosial seperti sikap, moral dan mental yang baik dan terbuka. Di samping itu, perlu disadari bahwa utang itu berasal dari pembayar pajak, yang umumnya masyarakat di negara kreditur, untuk diberikan ke penguasa di negara debitur yang biasanya korup. Tetapi paham kanan pun menyadari bahwa utang luar negeri tidak boleh dihentikan begitu saja, meskipun berbeda ideologi dan kepentingan dengan negara debitur.

Pandangan diatas berbeda dengan paham kiri atau sosialis (Seperti *Lappe, Hancock, Gitelson*) mengkritik utang luar negeri sebagai cara untuk memperkuat kekuasaan yang ada akibat terpusatnya sumber-sumber produksi ditangan segelintir orang. Oleh sebab itu, utang luar negeri tidak membantu kelompok miskin, tetapi justru membantu kelompok penguasa karena utang itu sering dijadikan alat untuk mempengaruhi kebijakan negeri debitur demi pasar mereka. Dana dari utang luar negeri untuk prasarana fisik, misalnya hanya menguntungkan investor asing dan perusahaan multinasional guna memperoleh keuntungan yang besar. Sistem ekonomi liberal merupa-

kan perpanjangan negara donor untuk mengeksploitasi tenaga kerja murah dan sumberdaya alam melimpah.

Demikian pula, Griffin dan Enos menyatakan bahwa utang luar negeri telah berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan, utang luar negeri meningkatkan pengeluaran negara sehingga akan mengurangi dorongan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan penerimaan lainnya. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa bantuan internasional yang diberikan sejak Perang Dunia II lebih banyak buruknya dari pada baiknya bagi negara debitur. Mereka berpendapat bahwa negara lebih baik tanpa berutang karena utang merupakan salah satu bentuk imperialisme. Namun mereka tidak kuasa menolaknya karena utang itu bisa melancarkan perekonomian, meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan sehingga membuat negara semakin besar ketergantungannya kepada negara donor.

Prawiro (2004) menjelaskan bahwa dari sudut pandang negara penerima bantuan, masalah-masalah yang berhubungan dengan bantuan luar negeri pada umumnya bisa dibagi ke dalam tiga kategori: *Pertama*, Bantuan diberikan dengan terlalu banyak persyaratan politik. Dalam situasi semacam ini, kedaulatan dari negara penerima bantuan bisa terusik oleh pemberian bantuan itu.

Kedua, Bantuan diberikan tanpa banyak panduan atau kepedulian tentang penggunaannya. Bila negara penerima bantuan menggunakan bantuan tersebut untuk kegiatan non-produktif, maka besar kemungkinan negara itu akan jatuh ke dalam kesulitan utang bila waktu pembayaran tiba. *Ketiga*, Bantuan diberikan cuma untuk memuaskan kepentingan bisnis pihak-pihak tertentu di dalam negara penerima bantuan,

dan tidak digunakan untuk keperluan ekonomi rakyat banyak.

Dari ketiga jenis pemberian bantuan yang salah arah ini, jenis kedualah yang sebelumnya diderita oleh Indonesia, negara menerima bantuan tanpa peduli dengan pembayaran kembalinya. Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama dalam perundingan dengan para kreditor kali ini. Oleh karena itu, Indonesia harus menggunakan metode pengelolaan utang yang lebih hati-hati dan cangguh.

Penutup

Dari hasil analisis dan kajian yang peneliti, maka ada beberapa hal yang dapat peneliti sarankan, yaitu ada 3 (tiga) hal penting yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu masalah hutang luar negeri, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Ketiga variabel ini saling berkaitan satu sama lainnya. Terdapat hubungan antara Hutang luar negeri dengan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dengan hutang luar negeri dan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dalam menjalankan pembangunan ekonomi sebaiknya Pemerintah harus memperhatikan ketiga variabel tersebut.

Untuk lebih memantapkan hasil penelitian ini, maka peneliti sarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan variabel yang sama dengan pendekatan analisis yang berbeda, yaitu model regresi sehingga akan diketahui variabel mana yang paling dominan mempengaruhi variabel lain, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengambil keputusan dalam hal ini adalah pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sjafi'i dan Nur Aini Hidayati. 2009. Genjot Anggaran Pendidikan-Redam Kemiskinan. *Gemari*. Edisi 101/Tahun X/Juni 2009: 68-69.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan (Edisi Keempat)*. STIE-YKPN. Yogyakarta.
- Asian Development Bank. 2008. *Melawan Kemiskinan di Asia Pasifik*.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Berita Resmi Statistik*. No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010.
- Departemen Komunikasi dan Informatika. 2008. Mengurai Benang Kusut Masalah Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*. Edisi 3 / November/Tahun II/2008.
- Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Online at http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/PROS_2008_MAK3.pdf. Diakses tanggal 15 Januari 2011.
- Mudrajad Kuncoro. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. (2nd ed.). UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Nssah, B. Essama dan Lambert, Peter J. 2006. *Measuring the Pro-Poorness of Income Growth within an Elasticity Framework*. World Bank Policy Research Working Paper 4035.
- Pantjar Simatupang dan Saktyanu K. Dermoredjo. 2003. *Produksi*

Domestik Bruto, Harga, dan Kemiskinan. *Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 51, No. 3, Hal. 191 – 324.

Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga. 2004. *Dampak Investasi Sumber Daya Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium*. Online at <http://ejournal.unud.ac.id/?module=detailpenelitian&idf=7&idj=48&idv=181&idi=48&idr=191>. Diakses tanggal 15 Januari 2011.

Sadono Sukirno. 2006. *Ekonomi Pembangunan (Edisi Kedua)*. Kencana. Jakarta.

Sudarno Sumarto, dkk. 2004. *Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-bukti Awal Desentralisasi di Indonesia*. Lembaga Penelitian SMERU.

Sumitro Djojohadikusumo. 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. LP3ES. Jakarta.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi kedelapan*. Erlangga. Jakarta.

World Bank. 2006. *Making the New Indonesia Work for the Poor*.

